



Gagasan & Inovasi / Ulasan (delete yang tidak perlu)

Desa Digital sebuah Konsep Katalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

*Rahmat Suyatna¹,

¹ Widyaiswara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten

(Diterima 5 Januari 2019; Direvisi 12 Pebruari 2019; Disetujui 25 Pdebruari 2019; Diterbitkan 6 Maret 2019)

Abstract: *This paper is the author's idea to discourse digital villages in order to empower village communities. The concept of digital village is a concept that captures the opportunities for the use of information technology that is developing very rapidly to improve services to the public, especially the empowerment of rural communities. In this electronic era, technology plays a very strategic role in the framework of accelerating public services and increasing business opportunities. Maybe in the future there will be a shift in the mindset of the service that was originally manual to digital. Likewise this will apply in the service and business sectors in the villages. In the old community service concept, buying and selling is done manually while in the millennial era this buying and selling is done digitally. This digital village concept is a discourse that must be continuously voiced so that village communities become more empowered. Empowerment of village communities must be the main focus in the allocation of village fund budgets in order to be able to increase original village income. Thus the digital village can be a catalyst in empowering rural communities.*

Keywords: digital village, fund, finance, market.

Author: Rahmat Suyatna, E-mail: suyatnar@yahoo.com, Tel. +62-0812-9145-4124.

Pendahuluan

Terinspirasi *Taobao Village* (Safitri, 2019) yang digagas pemerintah Republik Rakyat Tiongkok penulis tertarik menulisnya dalam bentuk gagasan untuk pengembangan desa digital di negeri yang kita cintai ini. Sejalan dengan berkembangnya Industri 4.0 yang merambah seluruh sektor pembangunan di Indonesia, termasuk wilayah perdesaan yang menjadi fokus pembangunan Indonesia. Pada saat bersamaan, LIPI sebagai wadah para peneliti memberikan masukan agar pemerintah Indonesia segera mempersiapkan infrastruktur teknologi informasi untuk mentrigger desa-desa bertransformasi dari desa analog (baca:manual) menjadi desa digital. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam mendongkrak daya saing Indonesia keseluruhan. Salah satu backbone

yang diperlukan saat ini adalah pembangunan infrastruktur jaringan internet yang dapat diakses di desa-desa terpencil, terutama desa-desa yang blankspot. Diperlukan anggaran yang tidak sedikit untuk mewujudkan. Namun, mimpi untuk menjadi negara besar menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong desa-desa untuk maju dalam arti yang sesungguhnya.

Indonesia memiliki kapasitas yang memadai untuk menerapkan konsep desa digital ini. Untuk memulainya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten wajib mendorong desa melakukan kemitraan dengan startup yang bergerak di bidang *e-commerce*. Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat digandeng untuk mengarahkan produk apa saja yang layak jual dan labelisasi produk. Diperlukan lebih dari sekedar koordinasi kelembagaan untuk dapat mewujudkan konsep desa digital ini.

Pemberdayaan masyarakat desa menjadi tujuan utama dari penerapan konsep desa digital ini. Salah satu faktor penghambat pemberdayaan masyarakat desa adalah belum optimalnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa sehingga karena ketidakmampuannya mengakibatkan pengelolaannya dikerjakan pihak ketiga (Yamulia Hulu, 2018, hal. 153). Alhasil, pemberdayaan masyarakat tidak menjadi fokus dalam penganggaran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) “terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada 2018. Jumlah tersebut terdiri atas 75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat), kemudian 8.444 kelurahan serta 51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT)” (Kusnandar, 2020). Fokus untuk lebih menekankan pengalokasian anggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat harus muncul dalam draf anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan adanya penekanan seperti ini maka Dinas PMD Kabupaten akan mengeluarkan edaran yang menguatkan pengalokasian anggaran untuk pemberdayaan masyarakat.

Fokus pemberdayaan masyarakat desa ini sudah tepat jika dilakukan saat ini karena hampir seluruh desa di Provinsi Banten yang berjumlah 1238 desa sudah tidak lagi mengedepankan pembangunan infrastruktur jalan desa. Sebagai gantinya, desa dapat mulai mengalokasikan anggaran pemberdayaan masyarakat agar desa memiliki pendapatan asli daerah desa (PAD Desa). Desa Digital adalah salah satu solusi meningkatkan peran serta masyarakat agar lebih berdaya.

Tinjauan Pustaka

Di era digital ini, konsep desa digital mengemuka ketika anggaran dana desa begitu masif masuk ke seluruh desa di Indonesia. Konsep ini nampaknya dapat menjadi katalisator dalam memberdayakan masyarakat desa. Dengan konsep desa digital ini, jika sebuah desa terhubung dengan fasilitas internet, maka desa akan menjadi lahan subur bagi penduduk

untuk mencapai produktivitas yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan, serta memungkinkan pemerintah untuk menjangkau jarak terjauh dan melanjutkan agenda pembangunannya. Bukan hanya itu, pemanfaatan aplikasi komputer untuk mempercepat layanan administrasi publik akan berdampak pada percepatan pelayanan. Tujuan akhirnya, jika layanan administrasi dilakukan secara digital maka pemberdayaan masyarakat juga akan terwujud. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Rendy Alvaro;Emillia Octavia, 2019, hal. 9) bahwa “Desa digital merupakan konsep program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi”.

Untuk pelaksanaan desa digital di Indonesia sudah bukan lagi wacana. Untuk itu, tingkat pendidikan masyarakat dapat memengaruhi pelaksanaan konsep desa digital ini. Menurut (Endra Wijaya, 2013, hal. 81-82) dalam Jurnal Dinamika Hukum bahwa:

“perkembangan desa digital itu dapat dipengaruhi setidaknya oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang berada di desa-desa. Apabila pendidikan mereka semakin baik, tentunya hal ini dapat pula menjadikan mereka semakin “melek teknologi informasi”. Secara teoretis, untuk sampai ke tahap melek teknologi informasi, maka harus diawali dulu dengan apa yang disebut dengan “melek informasi” (information literacy). Oleh karena itu, maka keadaan melek teknologi informasi ini jelas menempatkan pendidikan sebagai faktor (kunci) utamanya. Kedua, akses terhadap teknologi informasi. Saat ini, teknologi informasi sudah menjadi sesuatu yang umum, yang cenderung dapat dengan mudah diakses (dijangkau) dan dipelajari oleh sebagian anggota masyarakat. Ketiga, keseriusan upaya dari pemerintah untuk semakin memperkenalkan teknologi informasi kepada masyarakat, yang hal ini tidak lain akan bermuara pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang berbasis teknologi informasi (good e-government).”

Jadi, kata kuncinya, untuk dapat melaksanakan konsep desa digital diperlukan information literacy. Instansi terkait dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat desa melalui pola pelatihan atau penyuluhan tentang digitalisasi. Transformasi dari analog menjadi digital tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tetapi terencana. Sehingga pada waktunya, konsep desa digital ini dapat memberdayakan masyarakat desa.

Analisa

Dari konsep yang diajukan oleh penulis serta tinjauan pustaka dapat dilakukan analisis bahwa konsep desa digital adalah konsep yang menangkap peluang pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat untuk meningkatkan pelayanan kepada publik,

khususnya pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai contoh empirik, desa dapat didorong, melalui anggaran dana desa yang ada, untuk membangun portal digital market untuk dapat menjual potensi bisnis yang tersedia di desa. Konsep ini meniru Taobao Village di China yang mampu mengentaskan kemiskinan melalui program ini. Hal yang sama dilakukan oleh pemerintah kota Tangerang Selatan melalui proyek perubahan yang disusun oleh seorang pejabat pengawas yaitu Tangsel Market yang konsepnya merujuk pada digital market yang sudah ada (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marketplacetangselpenjual&hl=in>).

Dilihat dari sisi anggaran, desa dapat membangun Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes) Bersama semacam Holding Company namun Digital. Sehingga, satu kabupaten cukup membangun satu portal digital market untuk menampung produk loka para pengusaha desa se kabupaten. Dengan menerapkan syarat dan ketentuan batas pendapatan yang wajib sebagai ambang batas penghasilan setiap bulan sekian rupiah maka dapat dipastikan desa memiliki Pendapatan Asli Desa. Dari mana desa mendapatkannya, yaitu dari *fee* setiap transaksi yang dilakukan oleh para pengusaha dan pemanfaatan penyimpanan uang elektronik dari setiap transaksi yang dilakukan oleh *buyer*. Tentu konsep ini perlu terus diwacanakan agar mewujudkan menjadi kenyataan.

Kesimpulan

Memasuki era milenial ini begitu masifnya teknologi informasi merambah masuk ke sektor pemerintahan pusat sampai daerah hingga desa. Di jaman serba elektronik ini teknologi memainkan peranan yang sangat strategis dalam rangka percepatan pelayanan publik dan peningkatan peluang atau kesempatan berusaha. Mungkin ke depan akan terjadi pergeseran pola pikir pelayanan yang awalnya manual menjadi digital. Begitu juga hal itu akan berlaku di sektor jasa dan usaha di desa-desa. Dalam konsep bumdes lama, jual beli dilakukan secara manual sedangkan di era milenial jual beli ini dilakukan secara digital. Konsep desa digital ini adalah wacana yang harus terus disuarakan agar masyarakat desa menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan masyarakat desa harus menjadi fokus utama dalam alokasi anggaran dana desa agar mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Dengan demikian maka desa digital dapat menjadi katalisator dalam memberdayakan masyarakat desa.

Ucapan terimakasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Banten yang memotivasi para widyaiswara untuk terus menulis, Bapak Koordinator Widyaiswara BPSDMD Provinsi Banten yang telah memfasilitasi penerbitan di jurnal lingkaran widyaiswara.

Daftar Pustaka

Endra Wijaya, R. A. (2013). Desa Digital: Peluang Untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1 Januari 2013*, 75-88.

Hasibuan. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: ---.

Kusnandar, V. B. (2020). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/13/berapa-jumlah-desa-di-indonesia>. Diambil kembali dari katadata.co.id: <https://katadata.co.id/>

Rendy Alvaro;Emillia Octavia. (2019). Desa Digital: Potensi dan Tantangannya. *Buletin APBN Vol. IV. Ed. 08, Mei 2019* , 8-11.

Safitri, K. (2019, 12 13). <https://money.kompas.com/read/2019/12/13/162513726/lipi-sarankan-ri-adopsi-taobao-village-china-apa-itu?page=all>. Diambil kembali dari kompas.com: <https://money.kompas.com/r>

Yamulia Hulu, R. H. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 146-154.